BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan merupakan kegiatan yang tidak pernah berhenti sejalan dengan perkembangan masalah dan aspirasi di kalangan "stakeholders" pendidikan. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi masalah yang kompleks dalam penyediaan sumber daya manusia yang bermutu untuk menghadapi persaingan global. Jumlah tenaga kerja produktif yang besar tidaklah cukup, jika tidak ditunjang oleh kualitas kemampuan yang dibutuhkan dalam persaingan pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa betapa berat beban dunia pendidikan Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang bermutu, "marketable", dan bermoral tinggi.

Upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak lama, melalui proyek-proyek pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, baik yang didanai dari APBN ataupun bantuan dan pinjaman luar negeri. Hasilnya dapat terlihat dari bertambahnya jumlah dan jenis sarana pendidikan SD, SMP, SMA, SMK dan Perguruan Tinggi, serta bertambahnya jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan. Namun demikian, pada

kenyataannya secara kuantitas maupun kualitas rata-rata tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Data statistik menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih berpendidikan setingkat SMP ke bawah. Ini berarti bahwa rata-rata pendidikan penduduk masih di bawah SMP. Walaupun pemerintah sudah mencanangkan Wajib Belajar 9 Tahun, namun APK tingkat SMP masih di bawah 75% dari jumlah anak usia 6 – 15 tahun. Bahkan pada jenjang SMA/SMK, APK-nya baru mencapai 38% (Depdiknas, 2005). Ini berarti bahwa sebagian besar anak usia SMA/SMK belum dapat menikmati pendidikan yang bermutu seperti yang diharapkan para *stakeholders*.

Secara kualitas, prestasi siswa tingkat SMA/SMK ke bawah yang jika tolok ukurnya dengan menggunakan nilai UAN, maka rata-rata prestasi siswa setiap tingkatan sekolah dinilai masih jauh dari memuaskan. Pada tingkat SMA, misalnya, rata-rata nilai UAN siswa lulusan SMA untuk bidang-bidang Matematika, Fisika, Biologi, dan Bahasa Inggris sangat memprihatinkan, walaupun tidak dipungkiri, ada sebagian kecil lulusan SMA yang berprestasi cukup baik. Padahal dilihat dari sisi program kurikulumnya, siswa SMA diarahkan untuk menguasai mata pelajaran yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), baik pada tingkat pendidikan tinggi maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Kualitas hasil pendidikan dan kualitas proses pembelajaran tersebut merupakan gambaran dari rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia.

Rendahnya mutu sistem pendidikan di Indonesia berdampak pula pada rendahnya mutu sumber daya manusianya (SDM). Laporan UNDP mengenai *Human Development Index* (2005) menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-102 dari 106 negara yang disurvey, satu peringkat di bawah Vietnam.

Dalam perkembangan opini masyarakatpun, pendidikan seringkali dipandang tak mampu mengikuti akselerasi dinamika masyarakat. Perubahan masyarakat, akibat berbagai temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat segera diantisipasi oleh dunia pendidikan. Lembaga pendidikan tertinggal untuk memberi proses belajar yang relevan kepada peserta didik. Banyak pandangan melaporkan tentang kecakapan vokasional yang kurang dihasilkan dari lembaga pendidikan tingkat menengah. Menyimak permasalahan reformasi sosial-politik Indonesia, jenjang pendidikan SMA menyisakan banyak lulusannya yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Jumlah itu amat rentan bila dikaitkan dengan ketiadaan kecakapan vokasional dan sosial mereka untuk memasuki kehidupan kemasyarakatan. Hal tersebut merupakan realitas sosial yang menuntut perlunya program pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar peserta didik. Sebagian besar lulusan SMA yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi perlu mendapat perhatian ekstra. Dalam kepentingan inilah, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan perlu adanya kebijakan pendidikan yang berbasis pada

masyarakat luas (*broad-based education*) dengan orientasi penyediaan kecakapan untuk hidup (*life skills*) menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan dan perlu menjadi skala prioritas pembangunan pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK).

Konsep *life skills* berkaitan dengan paradigma *broad-based education* yang mewacanakan muatan dan pengelolaan pendidikan berdasarkan keadaan dan permasalahan masyarakat. Bersamaan dengan itu, maka dewasa ini telah dan sedang dikembangkan model manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (Manajemen Berbasis Sekolah) sebagai suatu alternatif pendekatan yang tepat dalam mengelola sekolah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, orientasi *life skills* menghindari sistem pendidikan yang hanya memenuhi kurikulum yang ditetapkan pusat. Sekolah-sekolah secara bersama-sama berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan memberikan kemampuan/kecakapan untuk hidup (*life skills*) bagi peserta didiknya yang mungkin tidak dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Sebagai suatu inovasi dalam pendidikan, program *Broad-Based Education-Life Skills* (BBE-LS) memiliki arti yang makin strategis. Program tersebut tidak saja memberikan harapan-harapan positif untuk keadaan yang makin baik, tetapi juga menimbulkan kecemasan dengan hadirnya masalah baru akibat pembaharuan itu sendiri. Situasi yang dilematis sering kali tidak dapat dihindarkan, sehingga yang satu dipentingkan yang lainnya terabaikan.

Hal tersebut disinyalir bahwa upaya-upaya pembaharuan yang antara lain dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan, pada kenyataannya lebih cenderung datang dari manajemen tingkat atas (*topdown*). Tentunya dalam rentang manajemen yang cukup panjang, cakupan variabel yang banyak, lokasi yang tersebar, dan banyaknya pihak yang terlibat sering kali waktu yang digunakan justru lebih banyak untuk memikirkan permasalahan administratif daripada hal-hal yang bersifat substantif (Beeby, 1979; Azis Wahab, 1987). Akibatnya, program pembaharuan yang dihasilkan tidak memenuhi persyaratan minimal dalam mencapai mutu yang baik.

Lebih jauh, sebagaimana temuan studi Engkoswara dkk. (1991) yang mengemukakan bahwa adakalanya terjadi beberapa upaya pembaharuan menghilang begitu saja dan ada pula yang "mengambang" menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut. Dalam pada itu beban penyelesaian masalah kependidikan menjadi semakin berat, hal ini disebabkan bukan saja masalah-masalah baru yang makin besar karena diferensiasi harapan yang bertambah banyak dan tuntutan akselerasi penanganannya yang tinggi, tetapi juga karena masalah lama yang belum atau tidak terselesaikan secara tuntas. Dalam kaitan ini, memantapkan orientasi ke arah desentralisasi penyelenggaraan upaya pembaharuan hingga pada tingkat satuan lembaga pelaksana operasional pendidikan (sekolah) merupakan kebijakan yang dianggap tepat.

Dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), pada prinsipnya sekolah memperoleh kewajiban *(responsibility)*, wewenang *(authority)*, dan

tanggung jawab *(accountability)* yang tinggi terhadap *stakeholders*. Peningkatan kinerja di sekolah secara unggul akan berhasil jika guru dan pengelola sistem pendidikan *(administrator)* bekerja secara profesional. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan. Seluruh komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf sekolah, maupun komite sekolah harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik intenal (siswa) maupun eksternal (masyarakat), pemerintah, maupun lembaga industri dan dunia kerja (*stakeholders*) (Mohrman, 1995).

Tantangan terhadap dunia pendidikan (sekolah) terus bertambah banyak. Akselerasi pola-pola kehidupan masyarakat yang juga sebagai konsekuensi dari pemacuan pembangunan nasional, telah menuntut dunia pendidikan untuk lebih antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat mendatang. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang sistematis agar program sekolah dibuat cocok dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang makin berkembang (Chadwick, 1995; Connolly and James, 2006)

Untuk mengembangkan program sekolah yang sesuai dengan kebutuhan "stakeholders" dibutuhkan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan tugas pokoknya di sekolah. Kepala sekolah, guru, staf sekolah, maupun komite sekolah dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pengembangan program sekolah yang relevan dengan kebutuhan *stakeholders* dan masyarakat luas. Selain itu, dibutuhkan pula

koordinasi dan integrasi untuk berkarya secara terpadu dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah atau instansi lain yang menggunakan lulusan pendidikan.

Profesionalisasi tenaga kependidikan yang belum mapan dapat menimbulkan kesulitan dalam merealisasikan sepenuhnya tuntutan imperatif dari kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan. Pada umumnya harapan banyak pihak agar institusi persekolahan menjadi sumber pembaharuan ternyata belum mampu menunjukkan eksistensinya yang mandiri. Kemampuan untuk memberikan tekanan balik terhadap "pressures" yang datang dari lingkungan eksternal nampaknya masih amat jauh. Alasan utamanya karena kondisi sistem persekolahan kita memang belum cukup siap. Orang-orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan satuan pendidikan sekolah, khususnya kepala sekolah cenderung masih berbuat dengan cara-cara yang konvensional dan belum inovatif (Sutisna, 1993; Wahab,1987; Beeby, 1979).

Pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, mendorong tanggung jawab yang besar terutama diberikan kepada kepala sekolah dalam memanfaatkan sumber daya dan pengembangan strategi program sesuai dengan kondisi setempat. Peran penting kepala sekolah adalah dalam memerankan fungsinya sebagai pemimpin di sekolah. Sebagai pemimpin di sekolah, ia memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi semua personil agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah (Davies, 2006;

Hariss, 2004). Hal ini harus dimulai dari perubahan-perubahan mendasar terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Upaya penciptaan iklim kondusif bagi terwujudnya perubahan dan pengembangan tidak lepas dari aspek kepemimpinan. Sebagaimana Sallis (1993:88) menyarankan agar pemimpin bidang pendidikan (dalam peningkatan mutu pendidikan) seharusnya:

1. Mempunyai visi atau daya pandang yang jauh dan mendalam tentang mutu yang terpadu bagi lembaganya maupun bagi dirinya;
2. Mempunyai komitmen yang jelas pada proses peningkatan kualitas;
3. Mengkomunikasikan pesan yang berkaitan dengan kualitas;
4. Meyakinkan kebutuhan peserta didik sebagai pusat perhatian kegiatan dan kebijakan lembaga/sekolah;
5. Meyakinkan para pelanggan (siswa, orang tua, masyarakat) bahwa terdapat *"channel"* cocok untuk menyampaikan harapan dan keinginannya;
6. Melakukan pengembangan staf;
7. Tidak menyalahkan pihak lain jika ada masalah yang muncul tanpa dilandasi bukti yang kuat;
8. Melakukan inovasi terhadap sekolah;
9. Menjamin struktur organisasi yang menggambarkan tanggung jawab yang jelas;
10. Mengembangkan komitmen untuk mencoba menghilangkan setiap penghalang, baik yang bersifat organisasional maupun budaya;
11. Membangun tim kerja yang efektif;
12. Mengembangkan mekanisme yang cocok untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Fungsi kepemimpinan tersebut menjadi sangat berperan penting dalam pengembangan program-program inovatif di sekolah. Salah satu program inovatif yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan SMA, sejak 5 tahun yang lalu (2002) telah dikembangkan program *Broad-Based Education Life Skills* (BBE-LS). Program ini diintegrasikan dalam kurikulum yang ada sebagai *added value* bagi peningkatan kualitas lulusan. Tujuan utama program BBE-LS adalah membekali peserta didik SMA dengan

berbagai keterampilan, baik yang terkait dengan program keterampilan akademik sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun keterampilan vokasional sebagai bekal untuk bekerja di masyarakat.

Secara kelembagaan, posisi penting SMA adalah mempersiapkan anak didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (PP. No. 29 Tahun 1990). Namun dalam kenyataannnya, hanya sebagian kecil lulusan SMA yang mampu melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Setiap tahun, sekolah menengah (SMA dan SMK) meluluskan siswa sekitar 1,3 juta orang (yang sebagian besar berasal dari SMA). Dari jumlah lulusan tersebut yang dapat ditampung di perguruan tinggi negeri dan swasta hanya sekitar 35% (Supriadi, 1997). Ini berarti bahwa sebagian besar lulusan SMA tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, walaupun mereka disiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada umumnya, lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi masuk ke dunia kerja tanpa bekal yang cukup untuk bekerja di bidangnya masing-masing. Sehingga lulusan SMA merupakan usia produktif yang seyogyanya tidak membebani masyarakat.

Pada hakekatnya program BBE-LS diasumsikan dapat mengurangi pengangguran produktif sehingga mereka memiliki bekal keterampilan untuk berkarya apabila karena sesuatu hal mereka tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Efektivitas pelaksanaan program BBE-LS sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di tingkat sekolah, antara lain:

analisis kebutuhan, kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana pendukung, dan dukungan *stakeholders*.

Dikarenakan belum adanya *research-based information* yang akurat tentang efektivitas pelaksanaan program BBE-LS pada jenjang pendidikan SMA selama ini, maka perlu ada penelitian khusus tentang pelaksanaan program BBE-LS yang ditetapkan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Berdasarkan kondisi objektif di atas dan harapan-harapan ideal dalam rangka implementasi BBE-LS yang efektif di masa datang, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pelaksanaan BBE-LS dengan berbagai variabel dan karakteristik yang menyertainya pada tiga SMA Negeri penerima dana BBE-LS di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat tahun 2006.

B. Fokus Masalah Penelitian

Pada hakekatnya, lulusan sekolah yang bermutu dan berahlak mulia hanya dapat dihasilkan oleh proses pendidikan sekolah yang bermutu. Sekolah adalah lembaga pelayanan profesional yang sasarannya adalah orang (*people processing institution*) yang secara esensial berbeda karakteristiknya dengan lembaga yang memproduksi barang (*good processing institution*). Perbedaan tersebut dapat dideteksi dari hakikat yang diproses (siswa), program dan fasilitas pemrosesan (kurikuluum dan fasilitas belajar), hubungan "multiple

processing" antara siswa dan pemroses (guru), bentuk layanan proses pembelajaran, dan faktor-faktor aktivitas siswa di luar sekolah yang bersamaan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tingkat kualitas input, proses, serta program dan fasilitas pembelajaran tersebut sangat menentukan kualitas produk (lulusan) sekolah yang dihasilkan.

Harapan sekolah untuk membangun kemampuan "*learning to know, learning to do, learning to be,* dan *learning to live together*" tampaknya tidak mudah. Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini adalah sebagian besar lulusan SMA tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Fenomena ini melahirkan persoalan serius karena mereka tidak memiliki kemampuan khusus untuk terjun ke dunia kerja dalam kancah persaingan global saat ini.

Program *Broad-based Education Life Skills* (BBE-LS) yang telah dikembangkan selama ini merupakan satu upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diharapkan pada akhirnya program tersebut berhasil memberikan bekal keterampilan vokasional disamping keterampilan akademik bagi lulusan SMA, terutama bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pelaksanaan program BBE-LS tersebut, menuntut kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah, dalam meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (siswa) maupun eksternal (masyarakat, pemerintah, maupun lembaga industri dan dunia kerja atau *stakeholders).*

Oleh karena itu, otonomi yang diberikan kepada sekolah dalam memanfaatkan sumber daya dan pengembangan strategi harus sesuai dengan kondisi setempat. Strategi pemberdayaan sistem perencanaan dan manajemen sekolah harus ditingkatkan, oleh karenanya gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis merupakan tuntutan yang tak terbantahkan.

Dalam konteks ini, kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran kunci dalam implementasi program *Broad-Based Education–Life Skills* (BBE-LS). Dengan peran kuncinya, kepala sekolah memiliki otoritas untuk merumuskan strategi implementasi BBE-LS tersebut di sekolahnya. Disadari bahwa pemilihan strategi implementasi BBE-LS mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi BBE-LS itu sendiri. Sementara sebagai suatu inovasi, BBE-LS belum memiliki standar implementasi baku. Oleh karena itu, eksplorasi tentang strategi implementasi BBE-LS ini perlu dilakukan, terutama pada sekolah-sekolah yang telah dan sedang memperoleh dana BBE-LS tersebut.

Penelusuran terhadap problema yang ditunjukkan pada tema penelitian tersebut di atas, amatlah menarik untuk diarahkan untuk mencari model implementasi program BBE-LS berdasarkan eksplorasi dan temuan tentang strategi implementasi BBE-LS yang telah dibangun dan dilaksanakan di tiga Sekolah Menengah Atas penerima dana BBE-LS, yaitu SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini dipusatkan pada masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

berikut: "*Bagaimanakah implementasi program BBE-LS berdasarkan pemahaman stakeholders terhadap strategi implementasi program yang dibangun atas dasar kondisi objektif di lapangan serta potensial menunjang peningkatan mutu lulusan SMA?*".

Secara rinci rumusan masalah penelitian tersebut dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman *stakeholders* pada SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 di Kota Cirebon terhadap program BBE-LS yang dikembangkan sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan?.

   Rumusan pertanyaan penelitian pertama ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

   a. Bagaimana pemahaman *stakeholders* sekolah terhadap substansi program BBE-LS di sekolah?
   b. Bagaimana pemahaman *stakeholders* sekolah terhadap prosedur pelaksanaan program BBE-LS di sekolah?
   c. Bagaimana pemahaman *stakeholders* sekolah terhadap kepemimpinan kepala sekolah dalam pelaksanaan program BBE-LS di sekolah?
   d. Bagaimana pemahaman *stakeholders* sekolah terhadap partisipasi dalam program BBE-LS di sekolah?
   e. Bagaimana pemahaman *stakeholders* sekolah terhadap dampak program program BBE-LS di sekolah?

2. Bagaimana strategi implementasi program BBE-LS yang aktual dan faktual dilakukan pada SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 di Kota Cirebon pada periode 2004-2006?

   Rumusan pertanyaan penelitian kedua ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

   a. Bagaimana sekolah mengidentifikasi sumber daya sekolah dalam program BBE-LS?
   b. Bagaimana sekolah menetapkan program/kegiatan dalam program BBE-LS?
   c. Bagaimana sekolah membagi tugas dan tanggungjawab dalam program BBE-LS?
   d. Bagaimana sekolah melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi dalam program BBE-LS?

3. Bagaimana hasil pelaksanaan program BBE-LS di SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon periode tahun 2004 – 2006?

   Rumusan pertanyaan penelitian ketiga ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

   a. Kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan sekolah dalam program BBE-LS pada periode tahun 2004 – 2006?
   b. Kegiatan-kegiatan program BBE-LS apa yang dapat diserap oleh masyarakat pada periode tahun 2004 – 2006?

4. Apa problema yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan sekolah dalam pelaksanaan program BBE-LS periode tahun 2004 – 2006?

   Rumusan pertanyaan penelitian keempat ini dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

   a. Apa problema yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan program BBE-LS?
   b. Bagaimana solusi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diarahkan pada diperolehnya informasi yang berhubungan dengan implementasi program BBE-LS berdasarkan strategi implementasi program yang dibangun atas dasar kondisi objektif di lapangan serta potensial menunjang peningkatan mutu lulusan SMA.

Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus berdasarkan hasil observasi yang bersifat eksploratif terhadap strategi implementasi BBE-LS yang telah dilakukan di SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon. Pada analisis terakhir, ekplorasi tersebut menghasilkan model hipotetik strategi implementasi BBE-LS, yang dapat membantu para Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, khususnya tugas-tugas manajerial dalam kerangka melaksanakan program BBE-LS yang lebih baik di masa datang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman *stakeholders* terhadap pelaksanaan program BBE-LS pada SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 di Kota Cirebon.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi implementasi program BBE-LS aktual dan faktual yang telah dilakukan di SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil pelaksanaan program BBE-LS yang dikembangkan sekolah di SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis problema yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan di SMAN 6, SMAN 7, dan SMAN 9 Kota Cirebon dalam pelaksanaan strategi implementasi BBE-LS.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi pengembangan keilmuan dalam bidang administrasi pendidikan atau manajemen pendidikan, khususnya berkaitan dengan manajemen mutu sekolah.

b. Konstribusinya terhadap pengembangan inovasi pendidikan, paling tidak, dapat memperkaya pengembangan teori, konsep dan pola

pengembangan inovasi pendidikan pada umumnya dan upaya pengembangan program-program inovatif di sekolah pada khususnya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembang ataupun peneliti berikutnya, sehingga semakin memperkaya khasanah wacana keilmuan, khususnya yang terkait dengan implementasi kebijakan operasional pada tingkat mikro organisasi pendidikan, manajemen sekolah, dan pengembangan inovasi di sekolah.

2. ***Manfaat Praktis***

a. Penelitian ini menghasilkan model analisis faktual tentang implementasi program BBE-LS berdasarkan strategi implementasi inovasi yang sangat diharapkan oleh para Kepala Sekolah, khususnya dalam kerangka implementasi kebijakan pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional.

b. Hasil penelitian ini memperkaya upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan, yang selama ini telah dirintis oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, serta telah diperkenalkan dalam berbagai Forum Kepala Sekolah, bahkan menjadi materi pokok Pelatihan Kepala Sekolah.

c. Pemikiran yang ditawarkan mengenai model implementasi program BBE-LS sebagai produk penelitian ini, dapat menjadi masukan yang berharga bagi para kepala sekolah, bahkan diharapkan menjadi acuan dasar dalam pengembangan mutu sekolah pada masa yang akan

datang.

d. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan, baik Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, maupun Dinas Pendidikan Nasional tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten, sehingga waktu mendatang dapat mewujudkan manajemen sekolah yang profesional.

E. Premis Penelitian dan Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang pemikiran masalah yang telah dibahas terdahulu, mengisyaratkan adanya sejumlah premis penelitian yang perlu diungkapkan untuk menuntun peneliti ke arah penentuan kerangka pemikiran.

Adapun premis yang diajukan terdiri atas pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pendidikan berdasarkan sistem *broad-based education* merupakan konsep inovasi dalam pendidikan yang mengacu pada *life skills*. Tujuan utamanya adalah untuk mengakomodasi perubahan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang bermutu, terutama bagi peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan membekalinya kecakapan hidup yang berguna di masyarakat.

2. Pelaksanaan Program BBE-LS di sekolah memerlukan pemahaman yang baik dan komprehensif dari seluruh *stakeholders* dalam upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan program.

3. Program BBE-LS di sekolah memerlukan penerapan strategi yang tepat dan sistematis dalam hal: mengidentifikasi sumber daya sekolah, penetapan program yang sesuai kebutuhan, pembagian tugas dan tanggungjawab, serta pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi.

4. Efektivitas pelaksanaan program pendidikan di sekolah (program BBE-LS) selalu berpautan dengan kekuatan unsur-unsur sistem sosial lainnya di sekolah dalam mengerahkan kemampuan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung dan mengeliminasi faktor-faktor penghambat. (Hoy dan Miskel, 2001; Sutisna, 1986; Davis dan Newstrom, 1985).

Berdasarkan premis tersebut, maka penyusunan kerangka pemikiran yang dikembangkan berguna untuk merumuskan dan membatasi masalah yang diteliti. Adapun pengungkapan kerangka pemikiran penelitian itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai bangun (*construct)* permasalahan yang ditelaah. Dengan demikian penelitian memiliki arah yang jelas, disamping memudahkan dalam menjabarkan setiap aspek masalah penelitian yang hendak ditangani.

Bangun permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini, dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran penelitian yang peragaannya dituangkan pada gambar 1.1 berikut.

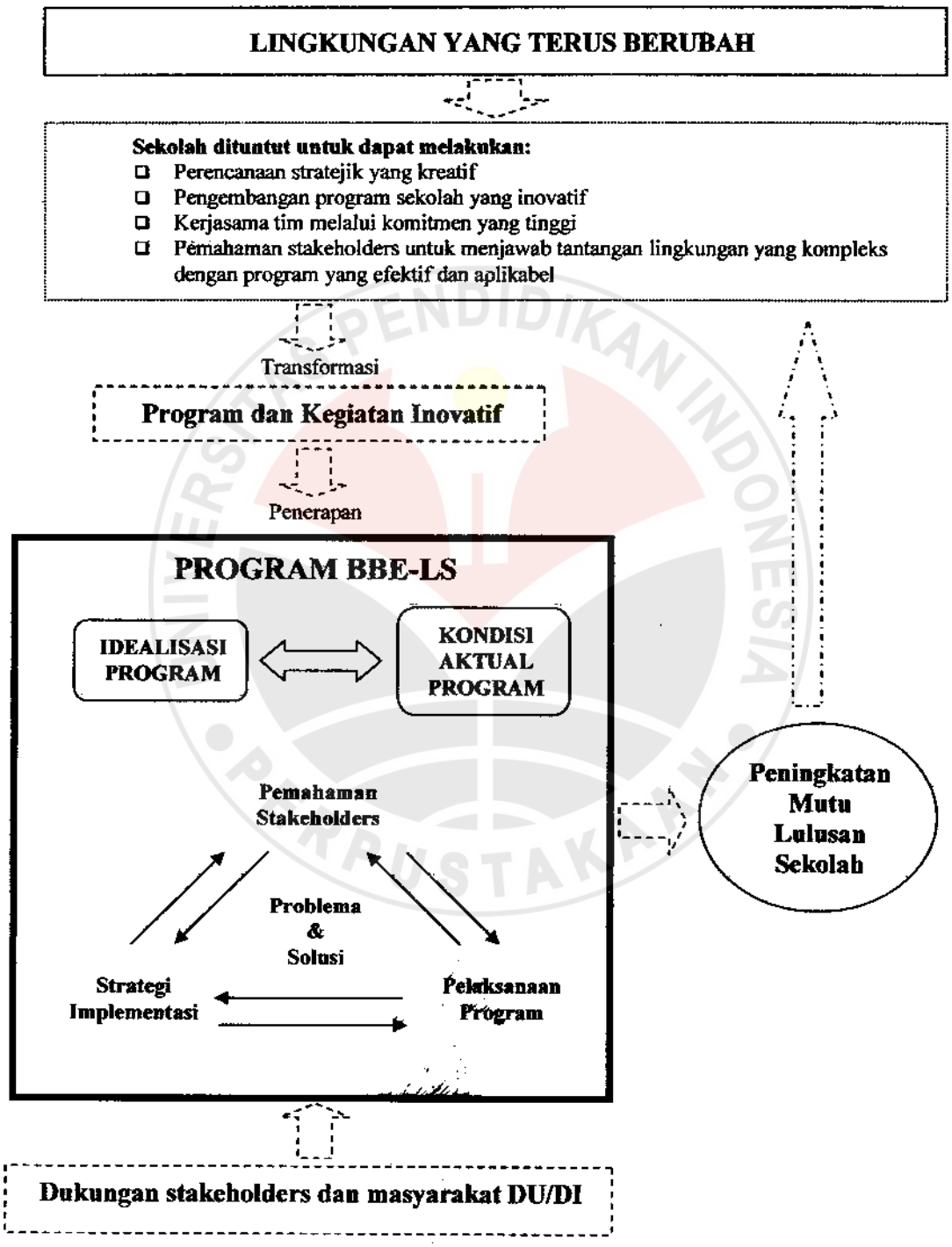

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelusuran dalam kerangka pemikiran penelitian tersebut bertolak dari pemikiran bahwa sebagai suatu bentuk inovasi dalam rangka merespon dinamika perubahan yang terjadi, program BBE-LS muncul menjadi salah satu alternatif yang diupayakan di sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, program BBE-LS perlu dikelola agar memiliki tingkat efektivitas pelaksanaan yang tinggi. Untuk dapat mengungkap pelaksanaan program BBE-LS yang dimaksud, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi yang sepatutnya terjadi atau dikatakan sebagai idealisasi kondisi dan kondisi yang nyata terjadi atau sebagai kondisi aktual dari aspek-aspek yang berkaitan dengan keberhasilan program. Dalam hal ini aspek-aspek yang disoroti dibatasi pada empat hal, yaitu: pemahaman *stakeholders*, strategi implementasi, hasil pelaksanaan, serta hambatan dan solusi.

Kemudian untuk menunjukkan arah tindak lanjut dari penelitian, maka pokok-pokok kajian tersebut sepatutunya ditempatkan dalam perspektif longitudinal. Paling tidak dari hasil kajian implikatif itu pada gilirannya akan dapat dihasilkan suatu alternatif rumusan model implementasi program BBE-LS di SMA.